
**KONTRIBUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM REPRODUKSI IDENTITAS SOSIAL MUSLIM
INDONESIA**

Saifudin Asrori, Ahmad Syauqi
Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
Email: saifudin.asrori@uinjkt.ac.id

Abstract. *The Islamic education, Islamic boarding schools and madrasas, have made a very significant contribution to the implementation of education and social reform. Through the teaching process, in which the kyai as the main figure and the use of the 'yellow book', traditional Islamic ideas colored the early days of growing awareness as a nation and a State. When the New Order government carried out the development and modernization of society, there was a revival of a Muslim group called the "new middle class santri", which took place in line with the modernization that occurred in the traditional Islamic educational institutions of the pesantren. Then in the era of democratization, the world of Islamic education experienced growth and development in various religious institutions and styles. Most of the pesantren are still committed to maintaining a moderate religious style, recognized as the foundation for the development of civil society and the formation of a 'distinctive', friendly, moderate, and tolerant social-political identity of Indonesian society. The Muslim character is different from other regions, especially the Middle East which is the axis of the Islamic world. However, a small proportion of pesantren are thought to promote the growth of religious chauvinism, teach a 'narrow' interpretation of Islam and provide a framework of thought and action in responding to socio-political change which often takes the form of a 'jihad'. This article tries to explore the contribution of Islamic education to social change in the Indonesian Muslim community.*

Keyword: *Pesantren; social identity; moderate; extremist; Indonesia.*

Abstrak. Dunia pendidikan Islam, pesantren dan madrasah, memberikan kontribusi sangat berarti dalam penyelenggaraan pendidikan dan reformasi kemasyarakatan. Melalui proses pengajaran, di mana kyai sebagai figur utama dan penggunaan 'kitab kuning', gagasan Islam tradisional mewarnai masa-masa awal tumbuhnya kesadaran sebagai bangsa dan Negara. Ketika pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan dan modernisasi masyarakat, terjadi kebangkitan kelompok Muslim yang di sebut "kelas menengah santri baru", berlangsung sejalan dengan modernisasi yang terjadi dalam lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren. Kemudian pada era demokratisasi, dunia pendidikan Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beragam kelembagaan dan corak keagamaan. Sebagian besar pesantren masih tetap *istiqomah* dalam mempertahankan corak keagamaan yang moderat, diakui sebagai pondasi berkembangnya masyarakat sipil dan pembentukan identitas sosial-politik masyarakat Indonesia yang 'khas', ramah, moderat, dan toleran. Karakter Muslim yang berbeda dengan kawasan lainnya, khususnya Timur-Tengah yang merupakan poros dunia Islam. Namun ada sebagian kecil pesantren dianggap mendorong tumbuhnya chauvinisme keagamaan, mengajarkan penafsiran Islam yang 'sempit' dan memberikan kerangka pemikiran dan aksi dalam merespons perubahan sosial-politik yang seringkali berbentuk panggilan 'jihad'. Artikel ini mencoba mengeksplorasi kontribusi pendidikan Islam dalam perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Pesantren; identitas sosial; moderat; ekstremis; Indonesia.

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/mimbar.v37i1.17947>

Pendahuluan

Dalam dua dasawarsa terakhir, penguatan identitas keagamaan di ruang publik berdasarkan penafsiran radikal atas nama ajaran agama dinilai sebagai bentuk kemunduran Muslim Moderat dan menjadi tantangan serius bagi upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia (Menchik, 2019). Bagi sebagian kalangan, kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya pergeseran orientasi keagamaan Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan dengan pengikut terbesar, ke arah yang lebih 'puritan' (Burhani, 2012). Masifikasi penyebaran ajaran 'pemurnian' agama oleh kelompok *salafy* melalui organisasi seperti FPI, Wahabi, Hizbut Tahrir Indonesia yang banyak menarik simpati kalangan masyarakat perkotaan dan kelas menengah. Bagi sebagian lainnya, kondisi tersebut disebabkan ketidakmampuan dunia pendidikan Islam dalam mengakomodasi kompleksitas perubahan sosial masyarakat modern. Pendidikan Islam dianggap mendorong tumbuhnya chauvinisme keagamaan, mengajarkan penafsiran Islam yang 'sempit' dan memberikan kerangka pemikiran dan aksi dalam merespons perubahan sosial-politik yang seringkali berbentuk panggilan 'jihad' (van Bruinessen, 2008). Dunia pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam mengajarkan, memelihara dan mempertahankan nilai-nilai moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia.

Dunia pendidikan Islam telah mengalami perkembangan baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2016-2017, tercatat sebanyak 29.861 lembaga pesantren dengan jumlah santri 3,85 Juta yang tersebar di 34 Provinsi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan data tahun 2003-2004 jumlah pesantren tercatat sebanyak 16.656 lembaga. Pertumbuhan dunia pendidikan Islam, Pesantren dan Madrasah, berjalan seiring dengan perkembangan orientasi, pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Nahdlatul Ulama' (NU) (64.59%), Muhammadiyah (1.63%), Persis (0.43%), Al-Jami'ah al Wasliyah Al-Washiliyah (1.04%), Partai Islam (0.41), Matla'ul Anwar (0,29), Al- Khairat (0.44%), Nahdlatul Wathon (0.86), DDII (0.45), Perti (1.21), LDII (0.09%), GUPPI (0.38), Independen (23.13%), Lain-lain (5.06%) (Tempo, 2004).

Setiap organisasi keagamaan mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan orientasi keagamaannya. Ada lima model lembaga pendidikan Islam, yaitu: Pesantren Tradisional atau *Salafiyah*, Pesantren Reformis, Pondok Modern, Pesantren Salafi, dan Pesantren Independen. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan telah diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Artikel ini mencoba mengeksplorasi kontribusi pendidikan Islam dalam reproduksi identitas sosial Muslim. Reproduksi sosial merupakan proses yang berlanjut dari produksi sosial (nilai, habitus, dan sebagainya), yang dipertahankan dari waktu ke waktu. Produksi sosial sendiri adalah segala sesuatu (nilai, norma, stratifikasi sosial, struktur sosial) yang diciptakan dan dihasilkan oleh masyarakat melalui interaksi. Reproduksi sosial juga dapat dipahami sebagai pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kondisi demikian dipertahankan melalui sistem pendidikan. Menurut Bourdieu, reproduksi sosial terletak pada hubungan antara pendidikan, keluarga, dan kelas sosial. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjalankan reproduksi sosial.

Pesantren Dan Reproduksi Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Bagaimaimana agama membingkai identitas, membentuk aksi dan digunakan menggalang massa, sekaligus digunakan bagaimana nasionalisme berdampak bagi definisi tentang identitas agama dan gerakan-gerakan keagamaan.

Karya monumental Anderson, *Imagined community*, memberikan gambaran penting bagaimana kesadaran ber-Negara tidaklah terbentuk dari kesatuan-kesatuan organik seperti kesamaan ras, suku, agama, tempat tinggal dan budaya, namun berdasarkan sesuatu yang dianggap ‘*imaged*’. Indonesia, bagi Anderson, menjadi bukti kongkrit bahwa sesuatu yang dianggap ‘*imaged*’ seperti rasa tertindas, baca *in-lander*, menjadi salah satu pemicu kesadaran berbangsa dan bernegara (Anderson, 2020). Semangat perlawanan terhadap penjajahan dibingkai dalam semangat keagamaan melalui penciptaan simbol-simbol perlawanan seperti Belanda sebagai ‘pesaing yang rakus’, ‘cultural poison’, ‘Wilanda itu kafir’ dan sebagainya (Abdullah, 1994).

Sejarah mencatat bahwa pesantren dan kyai telah menjadi basis perjuangan umat dalam melawan penjajahan. Kemampuan dunia pesantren dibuktikan dengan kebijakan Pemerintah untuk Islam antara lain; *Pertama*, Kebijakan pendidikan dan Islam, implementasi kebijakan ini terlihat dengan didirikan *Priesterreden* (Pengadilan Agama) pada tahun 1882 yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren, diikuti peraturan pada tahun 1932 untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah. *Kedua*, ordonansi Guru. Ordonansi ini dikeluarkan pada tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Peraturan tersebut diperketat pada tahun 1925 yang membatasi siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji (Noer, 1982). Kebijakan tersebut juga dibarengi dengan diskriminasi bantuan finansial. Deliar Noer mencatat bahwa pada tahun-tahun 1936, 1937, 1938 dan 1939 jumlah bantuan finansial dari pemerintah kolonial untuk masyarakat Kristen mencapai 972.600; 973.900; 992.500 dan 1.179.700 gulden (Noer, 1982). Sedangkan yang diterima oleh masyarakat Islam pada tahun-tahun tersebut hanya berkisar antara 7.500-7.600 gulden. Warisan Hindia Belanda, khususnya dalam bidang keagamaan adalah *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang dapat dilihat sebagai embrio Departemen Agama di Indonesia.

Geertz dalam *Agama Jawa* (2016) yang membagi masyarakat Jawa menjadi tiga aliran yaitu: *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Bagi Geertz, Santri melihat Islam sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris, komunitas yang semakin lama semakin lebar dari lokal hingga internasional. Santri juga tidak pernah memandang agama sebagai serangkaian kepercayaan semata-mata, sejenis filsafat yang abstrak. Sedangkan dari sisi organisasi, kaum santri berpusat di empat lembaga sosial yang utama; (1) partai politik Islam berikut organisasi sosial dan amalnya; (2) sekolah agama; (3) lembaga birokrasi pemerintah; (4) struktur lembaga keagamaan (Geertz, 2016). Meski Trikotomi Geertz banyak menuai kritik baik dari segi pendekatan yang dianggap modernis, atau pola stratifikasi sosial yang tidak berimbang, namun kemampuan kelompok santri dengan kepemimpinan kyai sebagai ‘pialang budaya’ mampu menyaring arus informasi yang masuk ke lingkungan santri dan selanjutnya menularkan apa yang dianggap berguna serta membuang apa yang dianggap dapat merusak bagi mereka (Geertz, 1960). Termasuk di dalamnya ‘pembungkahan’ ajaran Islam tradisional dengan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Kajian Dhofier di dua pesantren, Tebu Ireng Jombang dan Tegalsari Salatiga menyimpulkan, bahwa kyai masih terikat kuat dengan pola pemikiran Islam tradisional, namun mereka tidak mendambakan, apalagi melindungi pandangan hidup mereka menjadi suatu system yang tertutup dan memalingkan diri dari proses modernisasi. Sebagai contoh dengan didirikannya lembaga pendidikan formal di lingkungan pesantren adalah bukti nyata bahwa pesantren terbuka dengan sistem pendidikan modern. Ini berarti kyai menolak model pendekatan oposisi biner; tradisional dan modern. Perubahan-perubahan yang dilakukan pesantren melalui tahapan-tahapan yang pelan dan tidak mudah diamati. Dhofier juga menawarkan analisis terhadap nilai-nilai pesantren dengan paradigm epistemic yang mengkaji adanya ‘kesenambungan di tengah perubahan’ (*continuity and change*) di dalam lembaga pesantren. Dengan kata lain, betapapun terjadi pembaharuan di tubuh pesantren, namun hal itu merupakan pola sebelumnya (Dhofier, 2011). Menurut Dhofier, kyai bukanlah semata-mata “perantara budaya” yang mewakili baik kebudayaan Arab ataupun kebudayaan metropolitan dari kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sampai batas tertentu, di samping sebagai penjaga moral, kyai juga mampu menciptakan kebudayaan. Secara umum, kyai mengambil sikap terbuka dalam menyelenggarakan modernisasi pendidikan pesantren di tengah-tengah perubahan masyarakat Jawa, tanpa meninggalkan aspek- aspek positif daripada system pendidikan Islam tradisional (Dhofier, 2011). Kajian Dhofier, dikaitkan kajian oleh Turmudi terkait hubungan antara kyai di Jombang dengan perubahan situasi politik. Turmudi mencatat bahwa merupakan tokoh non-formal yang memiliki independensi tinggi, sehingga berdampak pada fragmentasi sosial mengikuti charisma ke-kyai-annya (Turmudi, 2006). Termasuk mengikuti corak keberagaman kyai tersebut.

Horikoshi meneliti pesantren Kyai Yusuf Tajri di daerah Cipari, Garut, Jawa Barat menyimpulkan bahwa, di desa kyai adalah tokoh Islam yang posisinya amat penting, yang telah memainkan peran kepemimpinan, social- keagamaan dan politik yang amat penting dan tampaknya tetap potensial. Dengan kedudukannya itu, oleh pemerintah setempat ia sering dimintai saran dan pendapatnya dalam urusan pembangunan masyarakat. Kyai pesantren juga ikut berperan secara aktif mengambil prakarsa dan mempelopori perubahan melalui caranya sendiri. Karena alasan ini kyai disebut sebagai agen perubahan social. Menurut Horikoshi, kyai pesantren yang lazimnya tidak memperhatikan kesan intelek, ternyata mampu melakukan perubahan social dengan tanpa harus mengorbankan identitas maupun karakter yang sejak awal telah dibangun. Meskipun unit sekolah dan madrasah telah mengalami banyak kemajuan tetapi pengajian kitab-kitab klasik juga tetap dilestarikan. Pesantren maupun masyarakat di sekitarnya tidak mengalami kesenjangan budaya (*cultural lag*) dengan dunia luar atau lingkungan eksternal. Meskipun kyai mendorong pesantren dan masyarakat di sekitarnya membuka diri terhadap dunia luar, namun pesantren tetap berpijak pada kearifan tradisinya. Dari aspek ekonomi, dengan banyaknya jumlah santri yang datang dari daerah pada girilirannya menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar pesantren yang membuka warung dan toko kelontong untuk melayani kebutuhan hidup santri (Horikoshi, n.d.).

Kajian menarik lainnya adalah Steenbrink mengkaji sejarah perjalanan pesantren dari masa kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan Indonesia, yakni system pendidikan Islam yang masih tradisional dengan metode sorogan, bandongan dan wetonoan tetap dikembangkannya, meski pesantren mendirikan madrasah formal dan sekolah umum. Menurut sejarahnya, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Tanah Air termasuk pesantren tidak lepas dari pengaruh pendidikan universal dari Barat, baik pada aspek kurikulum maupun dari aspek metodenya. Sistem pendidikan formal yang diadopsi di lingkungan pesantren adalah bukti adanya pengaruh pendidikan Barat. Ia

memberikan istilah “menolak dan mencontoh” atau “menolak sambil mengikuti” kepada kalangan pesantren yang mengembangan kelembagannya dengan cara mengambil hal-hal yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi lama yang dipedomi kum santri (Steenbrink, 1988).

Disertasi Lukens-Bull *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*, melalui penelitian etnografis terhadap beberapa pesantren di Jawa, Bull melacak dan merekonstruksi perkembangan identitas kolektif masyarakat Muslim di Jawa, khususnya berhadapan dengan modernisasi dan globalisasi. Simpulan studi Bull antara lain, identitas religius, meskipun secara intens berinteraksi dengan berbagai elemen budaya, tetap merupakan titik tolak yang paling utama dalam bersikap masyarakat Jawa Timur. Bull mengevaluasi peran kyai dalam menggabungkan politik dan simbol-budaya Jawa ke dalam kurikulum pesantren, sehingga terbentuk karakter ‘keislaman’ yang mempunyai keunikan tersendiri. Proses penggabungan tersebut diistilahkan dengan “*peaceful jihad*” (Lukens Bull, 1997).

Disertasi Franklin, N. J. (2014) membahas tentang perkembangan dan perubahan politik Islam di kabupaten Lamongan yang terajut-terkelindan dengan budaya pesantren di daerah tersebut. Melalui kajian terhadap Pesantren Sunan Drajat sebagai representasi Pesantren NU dan Pesantren Karangasem sebagai bagian model pesantren Muhammadiyah. Melalui lensa teori Bourdieu *Habitus, ranah, capital simbolik*, dan *kekerasan simbolik*, sebagai alat analisis sistem pendidikan pesantren dalam melakukan reproduksi identitas sosial-keagamaan, juga mengkaji pengaruh *kyai* terhadap budaya politik umat. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif terkait sistem pesantren dan data empiris hasil pemilu dan survey sebagai data penelitian. Kajian ini menyimpulkan, bahwa perkembangan politik Islam di Lamongan terkait dengan sejarah Islam dan budaya pesantren yang kuat di kabupaten. Hasil kuatnya identitas keislaman terlihat dari hasil pemilu partai politik yang mempromosikan identitas Muslim, termasuk Masyumi dan partai NU pada pemilihan umum 1955; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama rezim Suharto (1966-1998); dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di era pasca-Suharto. Kekuatan partai politik Islam didukung oleh Pesantren Sunan Drajat mendidik santri untuk taat pada kyai dan menuntut masyarakat yang setia untuk mengikuti dan mendukung kandidat politik yang membela kepentingan NU. Disisi lain, Pesantren Karangasem mengajarkan santri untuk berpikir kritis, tetapi para pendidik sekolah mendorong pengikut mereka untuk mendukung kader yang mewakili konstituensi Muhammadiyah. Identitas NU dan Muhammadiyah tetap memberikan pengaruh yang menonjol pada pemilihan di Lamongan. Namun, perpecahan politik di antara tokoh-tokoh NU telah meningkatkan daya tarik pemilihan para kandidat Muhammadiyah, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kemampuan pesantren sebagaimana dicatat oleh Azra dan Afrianty adalah kemampuan akomodasi situasi yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan beberapa perbedaan mendasar (Azra, Afrianty, & Hefner, 2010). Pelajaran yang diutamakan dalam pendidikan pesantren adalah agama, sedangkan proses belajar-mengajar dan urusan pengelolaan dipengang langsung oleh seorang ulama tradisional. Setidaknya ada tiga peranan penting pesantren dalam komunitas Muslim, yaitu: sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu agama, tempat melestarikan tradisi Islam dan mencetak kader ulama. Tujuan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah dan sekolah Islam) yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemajuan umat Islam. Aktivitas pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan etika moral melalui kurikulum pendidikan modern sangat penting dan prospektif.

Melalui lembaga pendidikan islam tersebut peran penting untuk melakukan upaya modernisasi masyarakat Muslim di Indonesia akan mampu dipertahankan secara keseluruhan.

Pesantren Dan Reproduksi Muslim Modern

Pada masa Pemerintahan Orde Baru di mana proyek modernisasinya diawali dengan sikap 'kecurigaan' terhadap Islam dan kalangan pesantren. Beberapa tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid berusaha memecah kebuntuan tersebut. Selain itu, sebagian pesantren juga melakukan adaptasi dan adopsi pola pendidikan modern yang digencarkan oleh pemerintah.

Salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan dalam melihat pembaharuan pemikiran Islam tahun 1970an adalah ia merupakan sebuah pilihan politik (*political choice*) dari sebuah generasi Muslim yang terlibat dalam upaya menyelesaikan problem- problem bangsanya. Pemikiran Cak Nur msemilik akar-akar gerakan pembaruan Islam umumnya dihubungkan dengan kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad 20 melalui berdirinya Muhammadiyah (1912) dan Persatuan Islam (Persis, 1923) (Van Bruinessen, 2014). Tetapi secara teologis, pemikiran pembaharuan Cak Nur melebihi upaya kaum modernis Muslim yang mengarahkan diri untuk memperkenalkan kembali doktrin Islam yang lebih murni dan mempromosikan ortodoksi dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Pesan pembaharuan Cak Nur adalah kritik terhadap pembaharuan lama yang telah melembaga. Pada awal 1970, Nurcholish Madjid muncul dengan proklamasi bahwa, "kaum Muslim Indonesia telah mengalami kejumudan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, dan kehilangan *psychological striking force* dalam perjuangannya."

Cak Nur bahkan sampai pada kesimpulan bahwa organisasi-organisasi reformis, terutama Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis, telah mengalami stagnan dan kehilangan dinamisannya. Dalam istilahnya sendiri, "... telah menjadi beku sendiri, karena mereka agaknya tidak sanggup menangkap semangat dari ide pembaruan itu sendiri, yakni dinamika dan progresivitas." Alasan-alasan ini yang mendasari gagasan Nurcholish tentang "keharusan pembaruan pemikiran Islam" dan masalah integrasi umat."

Pokok pemikiran Cak Nur yang bisa dianggap sebagai peletak cita-cita Liberal adalah gagasannya tentang sekularisasi. Gagasan itu pertama kali Cak Nur publikasikan lewat tulisannya pada 1968 yang berjudul "Sekularisasi adalah Rasionalisasi, Bukan Westernisasi", kemudian disusul dengan tulisan yang sangat menghebohkan bertitel "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" (1970). Apa yang menjadi concern saya adalah, persoalan yang tidak atau belum terselesaikan menyangkut dasar negara telah menempatkan posisi generasi Muslim 1960an serba tidak menguntungkan. Pembaharuan Cak Nur hadir untuk mendobrak semua kebekuan itu. Melalui tulisan pada 1968, Cak Nur sebenarnya mencoba membangunkan umat Islam dari "tidur panjang" dogmatisnya. Cak Nur ingin mengingatkan sekaligus mengajak umat Islam untuk kembali menggunakan rasio, menggunakan akal budinya dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Lebih khusus, Cak Nur memaksudkan tulisannya itu sebagai dorongan kepada umat Islam untuk memilih cita-cita Islam yang lebih substantif dan menyeluruh. Tidak lagi pada perjuangan konstitusional negara Islam, melainkan pada membangun Islam Indonesia yang menerima dan diterima semua pihak. Cak Nur

bahkan menegaskan bahwa modernisasi, yang berarti rasionalisasi, adalah perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar.

Kondisi serupa juga terjadi di ranah politik kenegaraan. Di sini, pada saat itu, umat Islam Indonesia tidak bisa membedakan urusan yang benar-benar agama dan yang semata duniawi. Tokoh politik persis memanfaatkan kondisi demikian untuk kepentingan akumulasi perolehan suara partainya. Cak Nur ingin menyadarkan umat bahwa masalah politik adalah masalah yang tidak terkait dengan urusan agama atau ibadah. Cak Nur kemudian tampil dan menggemparkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, dengan melontarkan pernyataan “Islam Yes, Partai Islam No”, dengan bahasa yang lebih keras, sebenarnya kalimat ini juga mengingatkan “Islam yes, Negara Islam No. Slogan besar itu Cak Nur keluarkan mengingat partai-partai Islam saat itu seolah sudah menjadi “kultus tersendiri” bagi umat Islam Indonesia. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar.

Sosok lainnya yang perlu di catat adalah Abdurrahman Wahid bersama sejumlah aktivis muda NU kemudian terlibat dalam program melibatkan pesantren dalam pembangunan masyarakat dan transformasi sosial. Mereka mendirikan sejumlah LSM yang berkonsentrasi pada penerjemahan bahasa fikih dalam mengakomodasi ide-ide modern dan menjadikannya relevan dengan persoalan-persoalan sosial. Salah satu yang terkenal adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), berdiri pada 1983, dan diketuai oleh intelektual muda progresif Masdar F. Mas’udi. Dari rahim NU dan P3M ini kemudian lahir Jaringan Islam Emansipatoris (JIE) yang menawarkan paradigma keberagaman yang menjadikan pencarian solusi atas problem kemanusiaan dalam kehidupan riil sebagai komitmen utama agama. Selain melakukan studi dan penelitian, aktivitas P3M dan JIE meliputi pendidikan dan pelatihan, penerbitan, advokasi, dan seminar.

Menghadap tekanan pemerintah orde baru, pesantren banyak melakukan adaptasi dan adopsi sebagaimana penelitian Tan yang menyimpulkan bahwa mayoritas pondok pesantren, madrasah dan sekolah Islam lebih fokus pada misi pendidikan dan tidak memiliki agenda politik tertentu. Mereka lebih peduli dengan penanaman ajaran Islam dan keterlibatan masyarakat dari pada mencoba mempengaruhi kebijakan politik. Peran politik yang dilaksanakan yaitu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat sipil dan yang demokratis melalui perdamaian, resolusi konflik, dialog antar agama dan pemberdayaan perempuan. Menurut Tan, tradisi pendidikan di praktekkan dengan tiga cara, yaitu: (1) kebanyakan pendidikan Islam tertarik untuk memberikan pengetahuan dari kedua jenis mata pelajaran yaitu mata pelajaran agama dan umum; (2) Metode pengajaran tradisional didaktik masih banyak digunakan di sekolah-sekolah Islam tetapi tidak sedikit yang telah menerapkan metode andragogy; (3) mayoritas lembaga pendidikan Islam telah menyediakan beragam kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan keterampilan hidup dan kepemimpinan, sehingga dapat mendorong siswa untuk menginternalisasi dan mempraktikkan prinsip-prinsip hidup dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari (Tan, 2012).

Disertasi Florian Pohl berjudul; *“Religious Education and Secularization: Indonesia’s Pesantren Tradition and Civil Society”* tentang kemampuan pesantren dalam menanamkan nilai-nilai modernitas-demokratis dan penguatan civil society. Melalui kerangka sekularisasi, yaitu beranggapan bahwa modernisasi akan mengurangi atau menghilangkan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat modern.

Berdasarkan kajian lapangan, Pohl menyimpulkan bahwa pesantren telah mengambil peran penting dan aktif dalam memperkuat masyarakat sipil. Pohl, mengevaluasi kontribusi pendidikan pesantren dalam penguatan civil society, toleransi, pluralisme, HAM, demokrasi dan keadilan sosial (Pohl, 2007).

Nilan berpendapat bahwa lembaga pesantren mempraktikkan 'rezim kebenaran' yang idealnya menghasilkan warga negara atau anggota tertentu yang beroperasi melalui norma evaluatif; didukung oleh praktik keagamaan dan pedagogis, membentuk cara siswa sendiri memberikan makna dan nilai pada perilaku mereka, secara bertanggung jawab, kesenangan, dan aspirasi. Keunggulan budaya pesantren adalah 'semangat pendidikan', yang merupakan budaya pembelajaran seumur hidup, baik agama maupun sekuler. Nilan berpendapat bahwa kurangnya kenyamanan, kebebasan, dan kesenangan duniawi lainnya dalam sistem pesantren, mungkin memiliki efek gabungan dari membuat hubungan pedagogis dan pengetahuan yang ditawarkan oleh guru kesenangan utama atau kekayaan simbolis yang bisa diperoleh (Nilan, 2009).

Kajian lainnya menggambarkan bagaimana pesantren melakukan negosiasi dengan modernisasi. Asrori memngambarkan menjawab kemampuan pesantren dalam mempersiapkan para siswa untuk dapat berpartisipasi dalam era masyarakat modern dan penguatan masyarakat sipil. Peran pesantren di era modernisasi dievaluasi melalui program pendidikan terkait toleransi etnis, demokrasi dan keadilan politik dan sosial (Asrori, 2018).

Pesantren, Muslim Moderat Vs Muslim Ekstremis

Era demokrtasi dan keterbukaan bukan hanya berdampak pada perubahan sosial- politik masyarakat Indonesia, tapi juga meningkatkan sentimen keagamaan yang tidak jarang berbentuk kekerasan dan terorisme (Asrori, 2019). Setiap pemimpin keagamaan berlomba untuk mensuarakan orientasi dan keyakinan keagamaannya. Era ini juga ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam yang oleh sebagian kalangan dianggap mendorong tumbuhnya chauvinism keagamaan. Setiap tokoh agama dan lembaganya memiliki pengikut sendirinya, berdampak pada mencuatnya fragmentasi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia.

Terminologi muslim moderat yang dimaksud di sini merujuk pada cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah antara dua kutub ekstrem liberal dan ultra-konservatif, selalu bertindak adil dan berimbang dalam beragama. Kata *moderate* yang bermakna 1) *average in amount, intensity, quality, etc; not extreme* [rata-rata dalam jumlah, intensitas, kualitas, dan lain-lain; tidak ekstrem]; 2) *of or having (usual political) opinions that are not extreme* [pandangan politik yang tidak ekstrem; misalnya pandangan politik yang tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan]; 3) *keeping or kept within limits that are not excessive* [menjaga dalam batas-batas yang tidak berlebihan]. (Penyusun, 2013)

Dalam tradisi kesarjaan Islam, moderasi memiliki padanan dengan istilah *wasathiyah*, diartikan sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrath*), dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*). Konsep *wasathiyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: *pertama*, perantara atau penghubung (*interface/al- bainiyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, terbaik, adil, pilihan, dan utama (*superiority/al-kbiyâr*). *Wasathiyah* juga terkandung makna keadilan (al-ad); kemuliaan dan persamaan (*al- musawa*). *wasathiyah* merupakan metode berfikir, berinteraksi, dan

berperilaku yang didasari atas sikap seimbang (tawazun) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan sehingga dapat ditemukan suatu kondisi sikap yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Sikap keagamaan yang moderat ditandai dengan upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang antara spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, realistik dan idealis, dan lain sebagainya, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kedua kutub dan jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Bersikap seimbang dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Sikap beragama yang moderat ditandai dengan keseimbangan antara pengalaman agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*) dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi Negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Sikap moderat selalu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi Negara. Penerapan sikap moderat dalam beragama membutuhkan pengetahuan atau pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, serta kewaspadaan dan kehati-hatian bersinambungan.

Berdasarkan pengertian di atas, moderasi mempunyai makna yang sangat luas, beberapa ahli mencoba merumuskan indikator moderatisme seperti pengakuan terhadap pemerintahan demokratis, dukungan terhadap kebebasan sipil, mampu mengakomodasi peraturan syari'ah dan sekuler, bersedia bekerja melalui lembaga resmi negara; dukungan untuk sistem pemilihan di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing; dan pandangan dunia yang lebih terbuka dan toleran terhadap perspektif alternative. Menurut Schwedler (Schwedler, 2011), moderasi merupakan proses bukan kategori atau madzhab tertentu, memerlukan perubahan yang dapat digambarkan sebagai gerakan dalam satu garis dari radikal ke moderat. Sikap politik moderat berkaitan dengan pandangan liberal tentang hak-hak individu dan gagasan demokrasi tentang toleransi, kerja sama, dan pluralisme politik. Muslim Moderat ditandai dengan partisipasi aktif dalam koalisi pemerintahan, dukungan terhadap pemerintahan yang stabil melayani kepentingan individu dan kolektif. Ringkasnya, moderasi adalah "pergerakan dari pandangan dunia yang relatif tertutup dan kaku ke yang lebih terbuka dan toleran terhadap perspektif alternative.

Lawan dari moderat adalah ekstremisme dapat didefinisikan sebagai "gerakan sosial yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan melalui program dan kegiatan politik yang umumnya berbeda dengan program yang didukung oleh otoritas pemerintahan yang sah, dan melakukan pembatasan kebebasan individu atas nama tujuan bersama, membolehkan pembantaian massal terhadap mereka yang sebenarnya atau berpotensi tidak setuju dengan programnya.". Kondisi pikiran mereka tidak mentolerir adanya perbedaan. Mereka juga secara positif mendukung penggunaan kekuatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik, dalam pernyataan publik mereka meskipun mereka tidak begitu jelas dan ambigu mengenai hal ini, terutama ketika mereka masih dalam posisi lemah. Para ekstremis umumnya cenderung memiliki 'pikiran tertutup' yang tidak fleksibel, mengikuti interpretasi monokausal yang disederhanakan dari dunia di mana anda berada di pihak mereka atau melawan mereka, ataupun menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi.

Oleh karena itu, Moderasi beragama berada di esensi atau inti ajaran agama, sedangkan ekstremisme radikal merupakan bentuk keterasingan dari agama, baik dalam hal pemikiran maupun praktik. Kondisi keterasingan, dalam konteks ini, berarti bersikap berlebihan dalam satu atau lebih dari esensi agama tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang sebagai penyebab utama ekstremisme radikal, intoleransi, dan interpretasi yang kaku. Kalau dianalogikan sebuah bandul, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (ekstrem). Menurut Qaradawi strategi yang efektif untuk mencegah pemuda dari terpapar radikalisme dan ekstremisme penanaman nilai-nilai moderasi agama melalui pendidikan Islam.

Pendidikan Islam ini sering dianggap sebagai lembaga yang mempromosikan pendidikan intoleran dan militan yang kemudian menjadi akar gerakan radikal dan terorisme di Indonesia. Tuduhan dan stereotip pendidikan di pesantren harus diperiksa dalam konteks perubahan sosial karena saat ini pengaruh modernisasi dan globalisasi. Tindakan teror yang melibatkan pesantren dapat dianggap sebagai bentuk negosiasi tentang kondisi ruang publik yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan. Dalam kondisi ini, arus modernisasi mengurangi peran agama di ruang publik menjadi urusan pribadi, biasanya dalam bentuk marginalisasi dan penurunan peran agama. Jadi jika modernisasi dipahami sebagai marginalisasi agama, pengajaran dan pendidikan di pesantren dapat digolongkan anti modern.

Kajian van Bruinessen dalam *“Traditionalist and ‘Islamist’ Pesantren in Contemporary Indonesia”* memberikan kesimpulan bahwa tindakan radikal para alumni pesantren kebanyakan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kurikulum dan budaya (praktik keagamaan) yang secara umum berkembang di lingkungan pesantren. Berdasarkan kurikulum yang diajarkan, pesantren di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. *Pertama*, pesantren yang secara ideologi berafiliasi ke NU, pandangan kekagamaannya sama dengan NU dan kurikulumnya menekankan ajaran fiqh Syafi’i dan etika sufistik serta banyak dipimpin oleh kyai kharismatik. *Kedua*, pesantren yang secara ideologi berafiliasi dengan organisasi reformis atau Muhammadiyah. Ajaran fiqh yang diajarkan dilengkapi dengan al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. *Ketiga*, pesantren yang berbeda dengan jaringan NU dan Reformis, seperti pesantren al-Zaitun, Hidayatullah dan al-Mukmin Ngruki (van Bruinessen, 2008).

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren telah memberikan kontribusi penting bagi meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pola pendidikan pesantren juga terbukti mampu menjadi fondasi penting bagi penguatan demokratisasi dan civil society di Indonesia. Sayangnya, kuatnya arus ‘puritanisasi’ dan penyebaran ideology ekstrimis ada *sebagian kecil* pesantren mengalami keterpaparan ideology tersebut.

Daftar Pustaka

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: *New Left Books*, 14.

- Asrori, S. (2017, November). Negotiating Public Sphere Modernity and Civil Society in Pesantren. In *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*. Atlantis Press.
- Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1).
- Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2007). Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia. *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education*, 172-98.
- Bull, R. A. L. (1997). *A Peaceful Jihād: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction* (Doctoral dissertation, Arizona State University).
- Burhani, A. N. (2012). Al-tawassuṭ wa-l i ‘tidāl: The NU and moderatism in Indonesian Islam. *Asian Journal of Social Science*, 40(5- 6), 564-581; Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia. *dalam Jurnal Miqot*, 36(2).
- Deliar, Noor. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta; LP3ES, 1980), hal. 49-63
- Endang, T. (2003). Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java.
- Franklin, N. J. (2014). *Reproducing Political Islam in Java: The Role of Nabdlatul Ulama and Muhammadiyah Pesantren in the Political Socialisation of the Umat* (Doctoral dissertation, Charles Darwin University)
- Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker. *Comparative Studies in society and history*, 2(2), 228-249.
- Geertz, C. (2016). *Agama Jawa Abang, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.
- Horikoshi, H. (1987). *Kyai dan perubahan sosial*. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Jahroni, J. (2007). The salafi movement in Indonesia: from Muhammadiyah to Laskar Jihad. *Islamic Thought and Movements in Contemporary Indonesia. Indonesia: Kanisius and the Centre for Strategic and International Studies*.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Moderasi Beragama. *Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI*.
- Martin van Bruinessen, *Liberal and Progressive Voices in Indonesian Islam*, Unpublished paper, hal. 1-2.
- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and democratic breakdown in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 415-433.
- Nilan, P. (2009). The ‘spirit of education’ in Indonesian pesantren. *British journal of sociology of education*, 30(2), 219-232.
- Pohl, F. (2007). *Religious Education and Secularization: Indonesia's Pesantren Tradition and Civil Society* (Doctoral dissertation, Temple University).
- Robert van Neil, *Munculnya elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 115
- Shihab, Quraish. *Wasatiyah Islam* (Ciputat, Lentera Hati, 1999)
- Tan, C. (2012). *Islamic education and indoctrination: The case in Indonesia* (Vol. 58). Routledge.
- Taufik Abdullah, History, Political Images and Cultural Encounter: The Dutch in the Indonesia Archipelago, *Study Islamika* 1, no.3 (1994): 9-12
- Van Bruinessen, M. (2008). Traditionalist and Islamist pesantrens in contemporary Indonesia. *Farish A.*

Zulkifli (2002). *Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).